

## Pilihan Membuat Partai

Pilihan warga NU untuk membuat suatu partai tersendiri adalah langkah yang tepat. Dan oleh karena itu, jumlah ini ikut pula mengucapkan selamat atas berdirinya partai *nahdliyyin* itu. Berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) —demikian nama partai itu— akan memulai “eksperimen politik” yang menentukan banyak hal dalam interaksi warga NU dengan kekuatan golongan-golongan politik lain; juga akan membawa dampak yang panjang bagi masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Penilaian ini bukan semata-mata berangkat dari “gede rasa” warga *nahdliyyin* sendiri, akan tetapi dari kenyataan bahwa dalam satu dekade terakhir ini, NU —*via* Ketua Umumnya, Abdurrahman Wahid— telah terlibat dalam kancan “politik sipil” secara cukup berarti. Keterlibatan itu tidak saja bersifat pinggir. Dalam banyak hal, keterlibatan NU itu justru merupakan langkah “terobosan” yang cukup berani, sehingga menentukan corak politik sipil secara keseluruhan.

Ada banyak keberatan diajukan terhadap berdirinya PKB. Keberatan pertama yang paling banyak disuarakan adalah perasaan khawatir jika berdirinya partai itu akan membawa dampak yang kurang baik bagi NU sendiri sebagai organisasi masyarakat. Pertanyaan yang selalu diajukan: akankah PKB itu menyedot terlalu banyak tenaga warga NU sendiri, sehingga tenaga yang tersisa buat NU sendiri akan menjadi kian sedikit.

Keberatan kedua adalah kekhawatiran munculnya konflik-konflik setelah berdirinya partai. Konflik pertama adalah perbenturan antara kepentingan NU sendiri dengan partai tersebut; konflik kedua adalah perbenturan kepentingan elit dalam partai itu sendiri. Konflik-konflik itu jika tidak bisa diselesaikan dengan cukup baik, akan membawa masalah sendiri bagi NU secara keseluruhan.

Keberatan ketiga adalah kekhawatiran akan terganggunya “strategi kultural” NU untuk menjadi kekuatan yang akan mendorong terciptanya “masyarakat sipil” di Indonesia. Jika NU telah mempunyai partai, akankah usaha-usaha yang dilakukan oleh kalangan NGO dalam NU untuk mendorong ormas ini menjadi eksemplar bagi kekuatan sipil yang kritis, kian memudar dan tenggelam dalam *tekek bengek* kerutinan sebuah partai.

Keberatan terakhir adalah berkaitan dengan sumber daya yang tersedia bagi NU untuk menyelenggarakan sebuah partai, baik sumber daya manusia atau keuangan. Dari sudut itu, harus diakui, PKB masih menghadapi soal yang menyusul. Setelah sekian lama meninggalkan kancan politik kepartaian, regenerasi politisi dalam NU boleh dikatakan praktis berhenti. Persediaan politisi untuk NU praktis berasal dari lapisan politisi tua yang sudah kurang disenangi oleh generasi baru NU. Dalam tiga dekade terakhir ini, regenerasi dalam NU hanya berlangsung secara baik dalam lapangan pemikiran dan aktivitas pemberdayaan masyarakat. Generasi baru NU yang lahir dari dua kancan itu jelas kurang memadai untuk mengisi “portofolio” sebuah partai.

Keberatan-keberatan itu jelas benar semuanya. Akan tetapi soal yang kita hadapi adalah, bagaimana memperjuangkan ‘aspirasi politik’ warga *nahdliyyin* jika tidak melalui sebuah partai. Boleh jadi akan ada yang menjawab: bukankah dengan menjadi kelompok penekan selama ini, NU juga bisa memperjuangkan aspirasi politiknya? Dengan kata lain, aspirasi politik bisa diperjuangkan melalui pelbagai saluran dan alat, bukan sekedar partai.

Jawabnya singkat saja: dalam iklim politik yang sudah kian terbuka seperti sekarang ini, aspirasi politik akan lebih efektif jika diperjuangkan lewat partai, bukan lewat saluran-saluran lain yang kurang “resmi”, seperti *lobby* dan negosiasi ekstra-parlementer. Semakin suatu aspirasi dipertarungkan secara terbuka, adil dan gentle dalam arena yang dapat dikontrol semua orang —seperti pademen, misalnya— maka makin baik pula perikehidupan politik suatu masyarakat. Dan sebaliknya pun benar adanya. Salah satu kesalahan masa lalu yang tak boleh diulang adalah bahwa karena sistem politik yang tertutup dan otoriter, umat Islam akhirnya memperjuangkan aspirasi politiknya secara sembunyi-sembunyi dan *lobby-lobby* yang tersembunyi dari mata publik. Akibatnya adalah tersebarnya rasa was-was dan cemburu di kalangan non-muslim.

Begitulah akibatnya, jika politik diselenggarakan dengan cara yang kurang terbuka. Hanya rasa curiga dan fitnah yang timbul dari sana. Bukan berarti, jika dilakukan dengan lebih terbuka, politik tidak menimbulkan hal yang sama, akan tetapi dengan cara dan adab untuk mengontrolnya.

Namun, kita juga layak bertanya dengan menyelidik: apakah isi “aspirasi politik” warga NU itu? Memperjuangkan tegaknya Islam ala *ahlisunnah wal jama’ah* saja? Memperjuangkan kepentingan yang bersifat ubudiyah belaka? Melindungi “identitas kultural”? Mempertahankan pesantren dan sekolah-sekolah agama? Membangun lebih banyak lagi masjid dan mushalla? Melindungi para da’i yang tersebar di kampung-kampung? Mencari tempat yang proporsional bagi kader-kader NU dalam kabinet atau birokrasi? Memperjuangkan lahirnya kelas pebisnis dari lingkungan *nahdliyyin*?

Tentu, tidak semua aspirasi politik warga NU bisa diluluskan. Bahkan, aspirasi mereka pelan-pelan juga harus “dicerahkan” agar sesuai dengan format kehidupan politik plural yang disangga oleh banyak kelompok dan golongan. Di sinilah kita layak berbicara tentang aspek “pendidikan politik” dari sebuah partai. Partai, bagi warga NU (juga bagi siapa saja), tidak hanya melakukan kegiatan “agregasi” kepentingan, tetapi juga “edukasi”; tidak saja tunduk kepada kepentingan warga, tetapi juga harus meluruskan kepentingan itu jika memang berlawanan dengan aturan main bersama.

Di atas segalanya itu, kita pasti juga bertanya apa yang akan dikerjakan PKB jika kelak menang dalam pemilu, lalu harus menyusun suatu pemerintahan? Pertanyaan ini layak untuk kita ajukan, oleh karena perhatian elit partai ini terhadap “program politik” amatlah kurang memadai. Di dalam pelbagai kesempatan, Matori Abdul Jalil, Ketua Umum PKB, banyak melontarkan gagasan tentang ide kebangsaan, demokrasi dan keadilan sosial. Ini adalah gagasan besar yang kurang berguna untuk menyelenggarakan sebuah pemerintahan kelak. Apa isi demokrasi, apa isi kebangsaan, apa isi keadilan sosial? Di situ banyak aspek, dimensi dan pokok soal.

Partai ini harus berbicara mengenai hal yang lebih praktis dan kongkret. Inilah yang kita maksud dengan “program politik”. Salah satu hal yang amat praktis tapi sulit saat ini adalah: bagaimana menyediakan sembako dengan cukup murah buat rakyat banyak. Dengan kata lain kita ingin mendengar dari partai NU ini: apa bentuk dari “politik pangan” yang akan dilaksanakannya jika kelak menang. ☞

Ulil Abshar-Abdalla